
Antara Legitimasi dan Distrust: Stigma Mahasiswa terhadap Elit Politik Pasca Pemilu 2024

Aisyah Zahra¹, Eka Vidya Putra^{2*}, Adzmy Altha Azkiya³, Annisya Sukma Dewi⁴, Difa Afriani Salsabila⁵, Metra Alvionita⁶, Dyanatul Arsyi⁷, Aulia Uzzaki⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan stigma mahasiswa terhadap elit politik setelah Pemilu 2024. Penelitian ini penting dikaji karena banyaknya mahasiswa yang komplain dengan kinerja anggota politisi yang kurang memuaskan untuk mewakili suara masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian dilakukan terhadap 185 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang terdiri dari Program Studi Pendidikan IPS, Geografi NK, dan Pendidikan Geografi. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin. Hasil analisis menunjukkan bahwa legitimasi tradisional memiliki rata-rata tertinggi (mean = 9.94), diikuti oleh legitimasi rasional (mean = 9.6), sementara legitimasi kharismatik memperoleh skor terendah (mean = 6.77). Skor stigma sosial terhadap elit politik juga cukup tinggi (mean = 10.05). Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakpercayaan yang signifikan dari kalangan mahasiswa terhadap elit politik, mencerminkan krisis representasi dan kepercayaan dalam sistem politik pasca pemilu. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui transparansi, integritas, dan representasi yang nyata terhadap aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Distrust; Elit politik; Legitimasi politik; Mahasiswa; Pemilu 2024.

Abstract

This study aims to analyze students' perceptions and stigma towards political elites after the 2024 General Election. The research is important to investigate due to the many students complaining about the unsatisfactory performance of politicians in representing the voices of the people. This study uses a descriptive quantitative approach and was conducted on 185 students from the Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang, consisting of students from the Pendidikan IPS, Geografi NK, and Pendidikan Geografi study programs. Data was collected through closed questionnaires using a five-point Likert scale. The analysis results show that traditional legitimacy had the highest average score (mean = 9.94), followed by rational legitimacy (mean = 9.6), while charismatic legitimacy received the lowest score (mean = 6.77). The social stigma score towards political elites was also quite high (mean = 10.05). These findings indicate a significant distrust among students towards political elites, reflecting a crisis of representation and trust in the political system post-election. This study emphasizes the importance of building public trust through transparency, integrity, and genuine representation of the people's aspirations.

Keywords: Distrust; general election 2024; Political legitimacy; Political elite; Students.

How to Cite: Zahra, A. et al. (2025). Antara Legitimasi dan Distrust: Stigma Mahasiswa terhadap Elit Politik Pasca Pemilu 2024. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025. (pp. 237-253). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Pada tahun 2024 Indonesia baru saja menyelesaikan kegiatan besar demokrasi, yakni pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum (pemilu) adalah proses demokrasi untuk memilih pemimpin pemerintahan suatu negara dengan melibatkan rakyatnya secara langsung, bebas, jujur, dan adil. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Parlemen proses pemilu di Indonesia, pemilihan umum parlemen dilaksanakan secara langsung, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak sebagai penyelenggara pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Parlemen Proses pemilu di Indonesia, pemilihan umum parlemen dilaksanakan secara langsung, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak sebagai pengawasan tujuan utama dan penyelenggara (Kori & Sariyani, 2024). Pemilu merupakan sebuah sarana pelaksanaan sistem demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan masyarakat umum sebagai anggota kedaulatan guna menentukan apakah seseorang harus dianggap sebagai wakilnya ataukah sebagai penguasanya.

Pelaksanaan sistem demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan masyarakat luas sebagai anggota kerakyatan dalam rangka menentukan apakah seseorang layak dijadikan wakilnya atau sebagai penguasanya. Partisipasi adalah politik ukuran efektivitas sistem demokrasi, dan pemilu merupakan alat untuk menentukan siapa yang akan terlibat dalam pemerintahan dari sistem demokrasi, dan pemilu adalah alat untuk menentukan siapa yang akan terlibat dalam pemerintahan (Yusrin & Salpina, 2023). Menurut Arniti (2020) Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan berhubungan dengan partisipasi politik. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan demokrasi dan legitimasi. Hubungan antara partisipasi politik dan demokrasi sangat erat, dan bagaimana partisipasi politik berdampak pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Sistem politik untuk setiap bangsa adalah "urat nadi" yang berfungsi sebagai saluran darah untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara yang sehat serta sejahtera. Fungsi sistem politik yang baik dan makmur berpusat pada harapan besar dari bangsa dan negara untuk mengartikulasi "aliran darah" bagi pertumbuhan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan negara. Aspek-aspek tersebut mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam (Anggara, 2015). Struktur politik di Indonesia pada dasarnya menggunakan sistem demokrasi presidensial, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pemerintahan, termasuk menunjuk menteri-menterinya. Sistem ini memisahkan kekuasaan eksekutif (presiden dan kabinet), legislatif (DPR dan DPD), serta yudikatif (MA, MK, dan lembaga hukum lainnya). Struktur politik Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial yang dipadukan dengan sistem multipartai. Menurut Lestari (2022), perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai di Indonesia menyebabkan instabilitas dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mengontrol proses demokrasi, hadirnya koalisi yang tidak sehat dikabinet dan parlemen, serta konflik terus terjadi antara lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan.

Pemilihan serentak mencakup pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg), yang mencakup pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Idealnya model keserentakan pemilu terdiri dari pemilu serentak secara nasional dan lokal. Pemilihan nasional untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD dilanjutkan dengan pemilu serentak lokal untuk memilih gubernur, bupati, walikota, dan dewan provinsi masing-masing beberapa tahun kemudian (Khakim, 2023). Keberadaan politik di negeri ini pada dasarnya merupakan objek pembahasan yang tidak akan ada habisnya. Permasalahan mengenai politik dalam hal ini tidak jarang menjadi headline yang selalu menghiasi dalam media massa salah satunya terkait dengan kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini merupakan hal yang penting dalam hubungannya dengan masyarakat dan politik itu sendiri (Haryanto & Rahmania, 2015).

Pengertian secara sosiologis serta politik, elit dimaknai sebagai golongan yang memiliki kekuasaan baik secara resmi maupun tidak resmi dalam suatu lapisan sosial di komunitas. Mosca dan Pareto membagi tiga stratifikasi dalam bentuk kategori yaitu elit memerintah (governing elite), elit yang tidak memerintah (non-governing elite) dan massa diluar pemerintah(non-elite) (Pradana, 2019). Menurut Herbert Feith terdapat lima aliran besar partai politik di Indonesia, yaitu Nasional Radikal, Tradisionisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme. Menurut Pabottingi, yaitu Partai Politik Beraliran Nasionalisme, Partai Politik Beraliran Islam, Partai Politik Beraliran Komunis, Partai Politik Beraliran Sosialis, Partai Politik Beraliran Kristen/Nasrani (Purnamawati, 2017).

Secara resmi, pemerintah memiliki legitimasi yang sah melalui pemilu. Legitimasi prosedural merupakan ciri dari gagasan demokrasi prosedural yang berpegang pada asumsi bahwa pemerintah (the governor) mendapatkan kekuasaan jika yang diperintah (the governed) memberikan persetujuan mereka kepada penguasa. Dalam kerangka demokrasi prosedural, legitimasi untuk memerintah diperoleh melalui

pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) (Harjudin, 2020). Distrust atau ketidakpercayaan merupakan kondisi psikologis dan sosial ketika individu atau kelompok tidak lagi yakin bahwa pihak lain (dalam hal ini elit politik) akan bertindak sesuai harapan, nilai, atau norma yang disepakati. Ketidakpercayaan muncul saat ekspektasi dalam interaksi sosial tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan rasa kecewa, dikhianati, bahkan marah. Dalam konteks politik, distrust tidak hanya bersifat personal tetapi juga sistemik yakni memengaruhi cara masyarakat menilai legitimasi kekuasaan dan otoritas pemerintahan (Haryanto & Rahmania, 2015).

Penelitian tentang Elit Politik dalam sistem pemerintahan sudah dilakukan oleh beberapa penelitian diantaranya penelitian pertama dengan judul "Pertukaran Sosial Elit Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo" Tilome (2021), menjelaskan bagaimana elit politik melakukan pertukaran sosial berbasis sumber daya seperti finansial, figuritas, dan kekuatan sosial demi kemenangan dalam kontestasi Pilkada. Studi ini menekankan praktik politik transaksional yang mengakar dalam hubungan patron-klien antara elit politik, partai, dan masyarakat pemilih. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Putra (2024), menjelaskan bahwa ada kerangka etis yang diberikan dalam Keluaran 18: 21 dapat menjadi pedoman penting bagi para pemimpin politik di Indonesia, yang memberikan wawasan tentang tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabilitas, dan integritas. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Wahid (2021), menjelaskan bahwa Untuk meneruskan aspirasi masyarakat, dewan adat Moi harus mengambil keputusan melalui forum adat di kecamatan Maladofok Sayosa untuk menentukan kesiapan manusia adat yang layak menjadi pemimpin di Kabupaten Sorong yang notabene merupakan wilayah adat Moi. Keempat penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan et al. (2021), menjelaskan bahwa proses rekrutmen yang baik dapat menghasilkan politisi yang kapabel harapan didalam mengambil keputusan atau tindakan politik seorang elit politik lebih mengedepankan kepentingan umum dan etika maka tanggung jawab moral terhadap masyarakat dapat dilakukan dan celah korupsi menjadi tertutup. Kelima penelitian yang dilakukan oleh Sembiring et al (2021), menjelaskan bahwa relasi yang dibangun oleh H. Andiwarto dalam mempertahankan dinasti keluarga Masra terdiri dari tiga relasi yaitu relasi dengan elite politik, relasi dengan elite ekonomi, dan relasi dengan elite sosial. Relasi elite politik merupakan relasi yang paling vital dalam mempertahankan dinasti keturunan keluarga Masra.

Berdasarkan penelitian di atas yang memusatkan analisis pada aktor-aktor kekuasaan (elit politik dan partai) dalam kerangka pertukaran kekuasaan. Sementara itu, penelitian ini mengangkat isu yang berbeda, yaitu stigma dan ketidakpercayaan (distrust) dari kalangan mahasiswa terhadap elit politik pasca Pemilu 2024. Fokus peneliti lebih pada persepsi dan reaksi kelompok sosial terdidik terhadap legitimasi politik, bukan pada strategi dan transaksi kekuasaan di kalangan elit.

Metode Penelitian

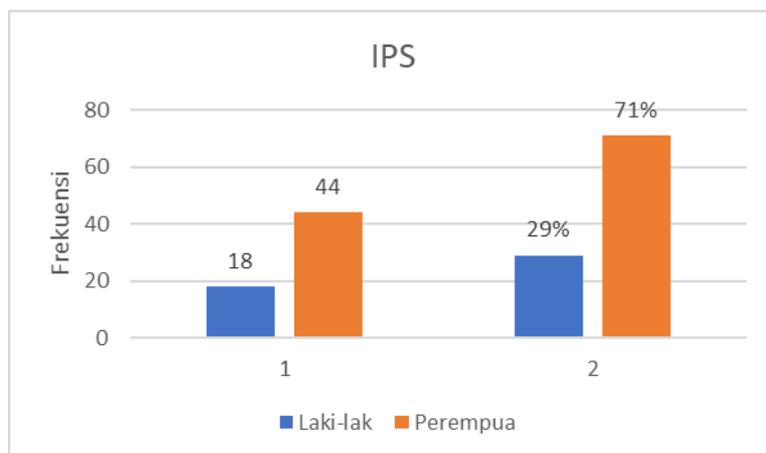
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deksriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis melalui pengolahan data angket dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari tiga program studi (prodi) di Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Negeri Padang (UNP), yaitu Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebanyak 117 mahasiswa, Prodi Geografi Non-Kependidikan (NK) sebanyak 111 mahasiswa, dan Prodi Pendidikan Geografi sebanyak 99 mahasiswa. Untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan, peneliti menggunakan rumus SRS, yaitu rumus statistik yang biasa digunakan untuk menghitung jumlah sampel dari populasi yang besar atau tak terbatas (Sugiyono, 2010). Berdasarkan Perhitungan tersebut, diperoleh kebutuhan sampel sebanyak 62 responden dari masing-masing prodi, sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 185 orang.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) menggunakan bantuan fungsi RAND pada Microsoft Excel, yang memungkinkan Pemilihan responden secara acak dan objektif dari setiap program studi. Instrumen penelitian berupa angket tertutup, di mana respon hanya tersedia dalam pilihan-pilihan yang telah ditentukan. Penelitian tidak menyebarkan angket secara langsung kepada responden, melainkan menyalin angket ke dalam Google Form dan menginputkan data sendiri berdasarkan hasil angket yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 23 dengan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, diagram, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, frekuensi, dan persentase untuk setiap item pertanyaan. Peneliti juga melakukan perbandingan antar ketiga prodi guna melihat perbedaan maupun kesamaan dalam pola respon. Untuk mendukung hasil analisis kuantitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan dari tiap prodi, yang hasilnya dikutip dan digunakan untuk memperkuat interpretasi data serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

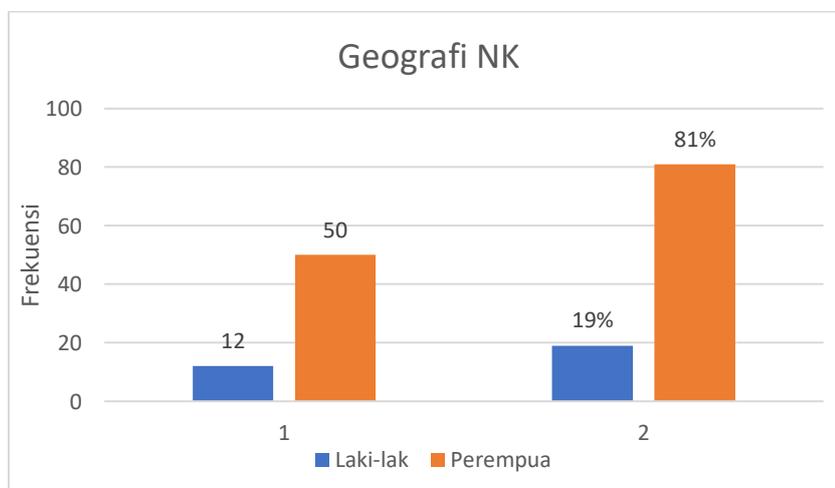
Secara geografis Fakultas Ilmu Sosial berlokasi di Jalan Prof. Dr Hamka, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173, Indonesia. Kampus ini terletak di kawasan strategis kota Padang, dengan akses yang mudah dari berbagai wilayah Sumatera Barat. Gedung-gedung utama FIS, termasuk gedung dekanat dan gedung laboratorium terpadu, menjadi pusat kegiatan akademik dan administratif fakultas. Secara demografis, Fakultas Ilmu Sosial UNP pada tahun akademik 2023/2024 menerima mahasiswa sekiitar 1.300 dari berbagai program studi. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel 185 mahasiswa dari program studi Pendidikan IPS, Geografi NK, dan Pendidikan Geografi.



Gambar 1. Jenis Kelamin Responden Prodi IPS

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 23

Gambar 1 menyajikan data jenis kelamin responden dari Program Studi IPS yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Penyajian data terbagi dalam dua bentuk, yaitu frekuensi absolut (kode 1) dan persentase (kode 2). Berdasarkan data frekuensi (kode 1), terdapat 18 responden laki-laki dan 44 responden perempuan. Sementara pada data persentase (kode 2), responden laki-laki berjumlah 29%, sedangkan responden perempuan mencapai 71%. Dari kedua penyajian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah responden perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, baik secara jumlah absolut maupun secara persentase. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah responden dalam penelitian ini dari Program Studi IPS. Data tersebut diperoleh dari hasil pengolahan menggunakan aplikasi SPSS versi 23.

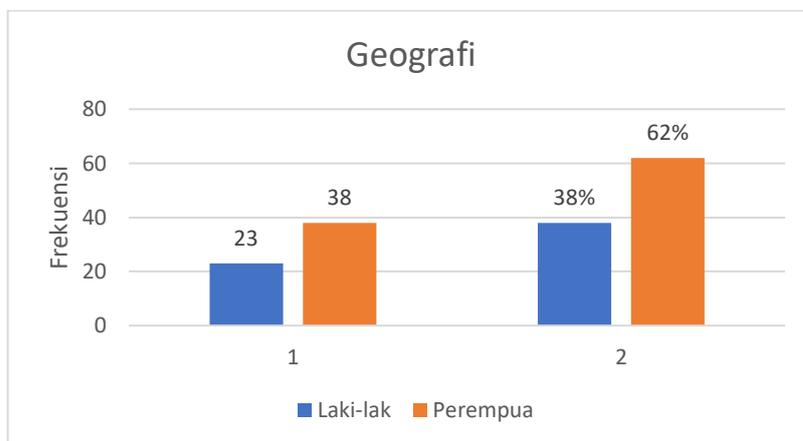


Gambar 2. Jenis Kelamin Responden Prodi Geografi NK

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 23

Gambar 2 memperlihatkan data jenis kelamin responden dari Program Studi Geografi NK berdasarkan jenis kelamin. Data disajikan dalam dua bentuk, yaitu frekuensi absolut (kode 1) dan persentase (kode 2). Pada penyajian frekuensi (kode 1), terdapat 12 responden laki-laki dan 50 responden perempuan.

Sedangkan dalam bentuk persentase (kode 2), jumlah responden laki-laki sebesar 19%, sementara perempuan sebesar 81%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Program Studi Geografi NK, perempuan mendominasi jumlah responden secara signifikan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Temuan ini dapat menggambarkan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa perempuan dalam program studi ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Seluruh data diperoleh melalui pengolahan menggunakan aplikasi SPSS versi 23.



Gambar 3. Jenis Kelamin Prodi Pendidikan Geografi

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 23

Gambar 3 menggambarkan data jenis kelamin responden dari Program Studi Pendidikan Geografi berdasarkan jenis kelamin, yang disajikan dalam dua format, yaitu frekuensi absolut (kode 1) dan persentase (kode 2). Berdasarkan data frekuensi (kode 1), jumlah responden laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Sementara itu, dalam bentuk persentase (kode 2), laki-laki mencakup 38% dari total responden dan perempuan sebanyak 62%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih dominan sebagai responden dalam Program Studi Geografi, baik secara jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam studi ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Seluruh data ini diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 23.

Tabel 1. Frekuensi dan Presentase Usia Responden

Usia	IPS	Geografi NK	Pendidikan Geografi
<20	48 (77%)	53 (86%)	56 (92%)
20-22	14 (23%)	9 (14%)	5 (8%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Pada tabel 1 diatas, data menunjukkan mayoritas responden di ketiga program studi masih berusia sangat muda (dibawah 20 tahun). Persentasenya cukup mencolok, 92% di Pendidikan Geografi, 86% di Geografi NK, dan 77% di IPS. Sementara itu, kelompok usia 20-22 tahun jauh lebih kecil, terutama di Pendidikan Geografi yang hanya 5 responden (8%). Hasil ini mengungkapkan bahwa karakteristik sampel penelitian didominasi Gen-Z yang baru memasuki dunia perkuliahan.

Tabel 2. Frekuensi dan Presentase Tempat Tinggal Responden

Status Tempat Tinggal	IPS	Geografi NK	Geografi
Kos-kosan	54 (87%)	56 (90%)	55 (90%)
Rumah Orang Tua	5 (8%)	4 (7%)	6 (10%)
Asrama	1 (2%)	0	0
Kontrakan	2 (3%)	2 (3%)	0
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas responden dari ketiga program studi IPS, Geografi NK, dan Geografi menyatakan bahwa mereka tinggal di kos-kosan. Hal ini ditunjukkan oleh persentase yang sangat dominan, yakni 87% responden dari IPS (54 orang), 90% dari Geografi NK (56 orang), dan 90% dari Geografi (55 orang). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memilih tinggal di tempat indekos sebagai bentuk hunian utama selama menempuh pendidikan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh lokasi tempat tinggal asal mereka yang jauh dari kampus atau kurangnya akses transportasi yang memadai. Sebaliknya, responden yang tinggal di rumah orang tua tercatat jauh lebih sedikit, yakni 8% di IPS (5 orang), 7% di Geografi NK (4 orang), dan 10% di Geografi (6 orang). Persentase ini mencerminkan bahwa hanya sebagian kecil mahasiswa yang masih tinggal bersama orang tua, kemungkinan besar karena kedekatan geografis dengan kampus.

Tinggal di asrama dan kontrakan menunjukkan frekuensi yang sangat rendah. Asrama hanya dihuni oleh satu responden dari IPS (2%), dan tidak ditemukan pada dua program studi lainnya. Sementara itu, tinggal di kontrakan hanya terjadi pada responden dari IPS dan Geografi NK masing-masing sebanyak 2 orang (3%), dan tidak ada pada program studi Geografi. Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa asrama dan kontrakan bukanlah pilihan tempat tinggal utama bagi mahasiswa. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa kos-kosan merupakan pilihan dominan bagi mahasiswa lintas program studi, yang mengindikasikan adanya kebutuhan akan fasilitas hunian sementara di sekitar area kampus. Fenomena ini dapat menjadi perhatian bagi institusi pendidikan tinggi dalam merancang kebijakan penyediaan atau kerja sama fasilitas hunian yang layak dan terjangkau bagi mahasiswa.

Tabel 3. Frekuensi dan Presentase Alat Transportasi Kekampus Responden

Alat Transportasi Kekampus	IPS	Geografi NK	Geografi
Angkutan Umum	4 (6%)	29 (47%)	3 (5%)
Jalan Kaki	21 (34%)	30 (48%)	34 (56%)
Kendaraan Roda Dua	34 (55%)	3 (5%)	21 (34%)
Ojek	3 (5%)	0	3 (5%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar responden dari prodi IPS (55%) menggunakan kendaraan roda dua untuk ke kampus, berbeda dengan responden dari Geografi NK dan Geografi yang lebih banyak berjalan kaki (48% dan 56%). Penggunaan angkutan umum menonjol pada Geografi NK (47%), sementara sangat rendah di IPS dan Geografi (masing-masing 6% dan 5%). Penggunaan ojek terlihat rendah di semua program studi. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas ke kampus sebagian besar didukung oleh kendaraan pribadi dan kemampuan berjalan kaki, tergantung pada jarak tempat tinggal. Tingginya persentase berjalan kaki juga berkaitan dengan banyaknya mahasiswa yang tinggal di kos-kosan dekat kampus.

Tabel 4. Frekuensi dan Presentase Pemilih Pemilu 2024 Responden

	IPS	Geografi NK	Geografi
Pernah	57 (92%)	45 (73%)	55 (90%)
Tidak Pernah	5 (8%)	17 (27%)	6 (10%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan peneliti (2025)

Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden dari ketiga program studi pernah menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024. Responden dari prodi IPS menunjukkan angka tertinggi dengan 92% pernah memilih, disusul Geografi 90%, dan Geografi NK 73%. Sementara itu, responden yang tidak pernah memilih paling banyak berasal dari Geografi NK (27%), yang menunjukkan tingkat partisipasi politik yang relatif lebih rendah dibanding dua prodi lainnya. Secara umum, data ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam Pemilu 2024 cukup tinggi, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum ikut serta dalam proses pemilu.

Tabel 5. Frekuensi dan Presentase Peminat Menjadi Politisi

	IPS	Geografi NK	Geografi
Berminat	6 (10%)	6 (10%)	3 (5%)
Ragu/Lihat kondisi nanti	14 (22%)	15 (24%)	9 (15%)
Tidak Berminat	39 (63%)	36 (58%)	44 (72%)

Tidak Tahu	3 (5%)	5 (8%)	5 (8%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Tabel ini menunjukkan minat mahasiswa menjadi politisi, dengan hasil yang mencerminkan dominasi sikap apatis. Di Program Studi Pendidikan IPS, hanya 6 orang (10%) menyatakan berminat menjadi politisi, 14 orang (22%) ragu dan menyatakan akan melihat kondisi di masa depan, 39 orang (63%) menyatakan tidak berminat sama sekali, dan 3 orang (5%) tidak tahu. Sementara itu, pada mahasiswa Geografi Non-Kependidikan (NK), jumlah yang berminat sama seperti IPS yaitu 6 orang (10%), namun lebih banyak yang ragu, yakni 15 orang (24%). Yang tidak berminat juga mendominasi sebesar 36 orang (58%), dan 5 orang (8%) tidak tahu. Pada Program Studi Pendidikan Geografi, respon “berminat” hanya muncul dari 3 orang (5%) responden, sedangkan 9 orang (15%) memilih ragu atau menunggu kondisi, 44 orang (72%) menyatakan tidak berminat, dan 5 orang (8%) tidak tahu. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa dari ketiga program studi tidak melihat dunia politik sebagai ruang aspirasi atau karier yang layak diperjuangkan. Ini dapat dikaitkan dengan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap elit politik atau ketidaktertarikan terhadap sistem politik yang dianggap tidak bersih dan kurang transparan.

Tabel 6. Frekuensi dan Presentase Anggota Organisasi Kemasyarakatan

	IPS	Geografi NK	Geografi
Tidak	52 (84%)	55 (89%)	51 (84%)
Ya	10 (16%)	7 (11%)	10 (16%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Data pada tabel ini mengungkapkan tingkat partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemasyarakatan. Pada Prodi Pendidikan IPS, sebanyak 52 mahasiswa (84%) tidak tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, sementara hanya 10 mahasiswa (16%) yang tergabung. Di Prodi Geografi NK, angka ketidakikutsertaan lebih tinggi lagi, yakni 55 mahasiswa (89%) tidak tergabung, dan hanya 7 mahasiswa (11%) yang terlibat dalam organisasi. Pada Prodi Pendidikan Geografi, kondisi serupa terjadi, dengan 51 mahasiswa (84%) tidak terlibat dalam organisasi, dan hanya 10 orang (16%) yang aktif. Fakta bahwa sebagian besar mahasiswa tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan menunjukkan lemahnya kesadaran kolektif dan rendahnya pengalaman sosial-politik di luar ranah akademik. Padahal, keikutsertaan dalam organisasi menjadi medium penting dalam membentuk kesadaran kritis dan pelatihan kepemimpinan. Rendahnya partisipasi ini juga dapat menjadi faktor mengapa ketertarikan mahasiswa terhadap politik begitu rendah, seperti yang terlihat pada tabel sebelumnya.

Tabel 7. Frekuensi dan Presentase Legitimasi Rasional Jawaban X1

“Saya menilai anggota DPR dalam menyusun per Undang-undangan berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan hanya menguntungkan elite politik atau kelompok tertentu saja”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	12 (19%)	16 (26%)	0
Setuju	23 (37%)	13 (21%)	2 (3%)
Ragu-ragu	10 (16%)	20 (32%)	16 (26%)
Tidak Setuju	14 (23%)	9 (15%)	26 (43%)
Sangat Tidak Setuju	3 (5%)	4 (6%)	17 (28%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Dalam mnanggapi pernyataan ini, persepsi mahasiswa tampak beragam, namun cenderung negatif, terutama di Prodi Geografi. Pada mahasiswa IPS, 12 orang (19%) sangat setuju, 23 orang (37%) setuju, 10 orang (16%) ragu-ragu, 14 orang (23%) tidak setuju, dan 3 orang (5%) sangat tidak setuju. Artinya, mayoritas mahasiswa IPS cenderung percaya bahwa DPR menyusun UU berdasarkan kepentingan masyarakat. Namun, mahasiswa Geografi NK cenderung lebih ragu: 16 orang (26%) sangat setuju, 13 orang (21%) setuju, 20 orang (32%) ragu-ragu, 9 orang (15%) tidak setuju, dan 4 orang (6%) sangat tidak setuju. Sementara itu, mahasiswa Prodi Geografi menunjukkan kepercayaan paling rendah terhadap DPR: tidak ada satupun yang sangat setuju, hanya 2 orang (3%) yang setuju, 16 orang (26%) ragu-ragu, 26 orang (43%) tidak setuju, dan

17 orang (28%) sangat tidak setuju. Ini mengindikasikan bahwa mahasiswa Geografi paling skeptis terhadap proses legislasi yang dijalankan DPR, dan menunjukkan gejala distrust yang tinggi terhadap fungsi legislatif.

Tabel 8. Frekuensi dan Presentase Legitimasi Rasional Jawaban X2

“Saya menilai anggota DPR dalam menyusun anggaran lebih mempertimbangkan kebutuhan rakyat dari pada kepetingan elite atau kelompok tertentu”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	6 (10%)	14 (23%)	0
Setuju	20 (32%)	7 (11%)	0
Ragu-ragu	14 (27%)	20 (32%)	8 (13%)
Tidak Setuju	15 (24%)	15 (24%)	32 (53%)
Sangat Tidak Setuju	7 (11%)	6 (10%)	21 (34%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Respons mahasiswa terhadap pernyataan ini kembali memperlihatkan krisis kepercayaan, mahasiswa dari Prodi IPS terdiri dari 6 orang (10%) yang sangat setuju, 20 orang (32%) setuju, 14 orang (23%) ragu-ragu, 15 orang (24%) tidak setuju, dan 7 orang (11%) sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa DPR menyusun anggaran dengan mengutamakan kebutuhan rakyat. Mahasiswa Geografi NK menunjukkan bahwa 14 orang (23%) sangat setuju, 7 orang (11%) setuju, 20 orang (32%) ragu-ragu, 15 orang (24%) tidak setuju, dan 6 orang (10%) sangat tidak setuju. Sementara itu, di Prodi Geografi, tidak ada satu pun mahasiswa yang menyatakan sangat setuju maupun setuju, 8 orang (13%) ragu-ragu, 32 orang (53%) tidak setuju, dan 21 orang (34%) sangat tidak setuju. Data ini mengindikasikan bahwa kepercayaan mahasiswa terhadap fungsi DPR dalam hal penganggaran sangat rendah, terutama di Prodi Geografi. Mahasiswa menilai bahwa anggaran lebih condong digunakan untuk kepentingan elite ketimbang kesejahteraan publik. Ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa, terutama di Geografi, kurang percaya bahwa DPR menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan rakyat. Mereka menganggap anggaran lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada masyarakat umum.

Hal ini diperkuat lagi dengan kutipan wawancara yang dikatakan oleh saudara FJZ, seperti ungkapan pada kutipan di bawah:

“...Menurut saya, citra politisi itu buruk karena banyak berita tentang korupsi, persaingan kotor, dan tindakannya itu tidak mencerminkan wakil rakyat. Jadi wajar kalau masyarakat, termasuk saya, jadi sinis melihat mereka...” (Wawancara tanggal 10 Mei 2025).

Dari kutipan di atas, mengungkapkan bahwa citra elit politik dibidang buruk pada saat ini ada alasan yang membuat citra politisi buruk karena banyak berita yang keluar dari media sosial, berita dari televisi, adanya kasus korupsi oleh para politisi, adanya persaingan kotor dan tindakan yang dilakukan oleh para politisi tidak mencerminkan seorang perwakilan rakyat. Jadi para masyarakat wajar memandang para politisi itu secara sinis dan informan juga memandang para politisi ini secara sinis.

Tabel 9. Frekuensi dan Presentase Legitimasi Rasional Jawaban X3

“Saya menilai anggota DPR dalam menyusun anggaran lebih mempertimbangkan kebutuhan rakyat dari pada kepetingan elite atau kelompok tertentu”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	8 (13%)	10 (16%)	0
Setuju	16 (26%)	15 (24%)	0
Ragu-ragu	14 (22%)	20 (32%)	15 (25%)
Tidak Setuju	16 (26%)	13 (21%)	33 (54%)
Sangat Tidak Setuju	8(13%)	4 (7%)	13 (21%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Pada tabel 9, dipaparkan bahwa mahasiswa dari prodi IPS sebanyak 8 orang (13%) sangat setuju, 16 orang (26%) setuju, 14 orang (23%) ragu-ragu, 16 orang (26%) tidak setuju, dan 8 orang (13%) sangat tidak setuju. Mahasiswa Geografi NK terdiri dari 10 orang (16%) sangat setuju, 15 orang (24%) setuju, 20 orang (32%) ragu-ragu, 13 orang (21%) tidak setuju, dan 4 orang (7%) sangat tidak setuju. Sementara di Prodi Geografi, tidak satu pun menyatakan setuju atau sangat setuju, 15 orang (25%) ragu-ragu, 33 orang (54%)

tidak setuju, dan 13 orang (21%) sangat tidak setuju. Mayoritas mahasiswa dari ketiga prodi menunjukkan sikap kritis, namun mahasiswa Geografi paling tegas menyatakan ketidakpercayaan terhadap komitmen program DPR terhadap rakyat. Hal ini memperlihatkan bahwa DPR belum berhasil membangun kepercayaan publik, terutama generasi muda, dalam membuktikan bahwa program-programnya berpihak pada masyarakat. Hasil ini menggambarkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa program kerja DPR tidak benar-benar dibuat untuk rakyat, apalagi di Prodi Geografi yang tidak ada satu pun menyatakan setuju.

Dalam wawancara tanggal 18 Mei 2025, yang disampaikan oleh saudari ZL, beliau menyampaikan bahwa elite politik saat ini hanya peduli pada kelompok tertentu.

“...Pendapat saya salah satu nya yaitu ada kekhawatiran bahwa perilaku elite politik saat ini seringkali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas masyarakat, cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan kurang akuntabel terhadap publik...” (Wawancara tanggal 18 Mei 2025).

Kutipan di atas menggambarkan, bahwa adanya rasa kekhawatiran oleh masyarakat terhadap perilaku elit politik saat ini, karena seringkali para politisi tidak mencerminkan perbuatan untuk kepentingan masyarakat banyak tetapi para politisi lebih cenderung mengfokuskan pada kepentingan pribadi mereka atau hanya fokus pada kelompok tertentu dan kurangnya akuntabel terhadap publik.

Tabel 10. Frekuensi dan Presentase Legitimasi Tradisional Jawaban X1

“Saya menilai anggota DPR mendapatkan kekuasaan karena kemampuan, bukan karena uang atau karena warisan status sosial keluarganya”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	8 (13%)	6 (10%)	0
Setuju	18 (29%)	11 (18%)	0
Ragu-ragu	14 (23%)	24 (39%)	14 (23%)
Tidak Setuju	17 (27%)	14 (22%)	31 (51%)
Sangat Tidak Setuju	5 (8%)	7 (11%)	16 (26%)
Total	62(100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Pada tabel 10 diatas, Prodi IPS, 8 orang (13%) sangat setuju, 18 orang (29%) setuju, 14 orang (23%) ragu-ragu, 17 orang (27%) tidak setuju, dan 5 orang (8%) sangat tidak setuju. Di Geografi NK, 6 orang (10%) sangat setuju, 11 orang (18%) setuju, 24 orang (39%) ragu-ragu, 14 orang (23%) tidak setuju, dan 7 orang (11%) sangat tidak setuju. Sementara di Geografi, tidak ada yang menyatakan setuju, 14 orang (23%) ragu-ragu, 31 orang (51%) tidak setuju, dan 16 orang (26%) sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak yakin anggota DPR mendapatkan kekuasaan karena kemampuan, tapi lebih karena uang atau hubungan sosial-politik. Data ini menunjukkan bahwa mahasiswa meragukan legitimasi tradisional para anggota DPR. Mereka tidak melihat bahwa kekuasaan diperoleh melalui kemampuan atau prestasi, melainkan melalui kekayaan, dinasti politik, atau akses terhadap kekuasaan.

Saudari AR pada wawancara tanggal 11 Mei 2025 menyampaikan bahwa, para anggota DPR bekerja hanya sekedar formalitas saja.

“...Saya pernah mendengar cerita dari media sosial bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sebenarnya hanya sebatas formalitas. Mereka datang, duduk, dan menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat administratif tanpa ada semangat atau inisiatif untuk membuat perubahan yang berarti. Banyak yang mengatakan bahwa keberadaan mereka lebih terlihat sebagai simbol atau pelengkap struktur, bukan sebagai individu yang benar-benar menjalankan fungsi dan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Bahkan, beberapa orang menganggap bahwa mereka hanya bekerja untuk menggugurkan kewajiban, agar terlihat aktif di mata atasan atau publik, padahal secara substansi, kontribusinya minim dan cenderung tidak berdampak. Cerita-cerita semacam ini sering muncul di media sosial, dan meskipun tidak semua bisa digeneralisasi, tetapi cukup membuka mata bahwa dalam beberapa institusi atau organisasi, masih banyak yang menjadikan pekerjaan sebagai ajang pencitraan daripada ruang pengabdian...” (Wawancara tanggal 11 Mei 2025).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa berita melalui media sosial menyatakan bahwa para politisi melakukan pekerjaan hanya sebagai formalitas semata. Mereka hanya datang ke kantor hanya duduk dan mengerjakan yang bersifat administratif tanpa ada semangat atau inisiatif untuk melakukan inovatif dalam pekerjaannya atau kebijakan. Bahkan mereka seperti hanya sebagai simbol untuk memenuhi struktur bukan

sebagai orang yang melakukan fungsi dan tanggung jawab sebenarnya. Beberapa orang menganggap bahwa mereka hanya bekerja untuk menggugurkan kewajiban, agar mereka terlihat aktif dimata atasan atau publik. Bahkan hal-hal seperti ini sudah banyak bersileweran dimedia sosial, tetapi cukup membuka mata bahwa beberapa institusi atau organisasi masih banyak yang menjadikan pekerjaan sebagai ajang pencitraan dari pada ruang pengabdian.

Tabel 11. Frekuensi dan Presentase Legitimasi Tradisional Jawaban X2

“Saya menilai anggota DPR mendahulukan kepentingan daerah pemilihan bukan kepada kelompok-kelompok tertentu saja”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	8 (13%)	9 (14%)	0
Setuju	18 (29%)	11 (18%)	0
Ragu-ragu	9 (14%)	21 (34%)	10 (16%)
Tidak Setuju	19 (31%)	14 (23%)	33 (54%)
Sangat Tidak Setuju	8 (13%)	7 (11%)	18 (30%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Terkait pernyataan legitimasi tradisional jawaban X2 tabel merincikan bahwa di IPS, 8 orang (13%) sangat setuju, 18 orang (29%) setuju, 9 orang (15%) ragu-ragu, 19 orang (31%) tidak setuju, dan 8 orang (13%) sangat tidak setuju. Di Geografi NK, 9 orang (15%) sangat setuju, 11 orang (18%) setuju, 21 orang (34%) ragu-ragu, 14 orang (23%) tidak setuju, dan 7 orang (11%) sangat tidak setuju. Sedangkan di Geografi, tidak ada yang setuju, 10 orang (16%) ragu-ragu, 33 orang (54%) tidak setuju, dan 18 orang (30%) sangat tidak setuju. Artinya, mahasiswa merasa bahwa anggota DPR tidak benar-benar memperjuangkan aspirasi dari daerah asal mereka. Ketimpangan yang besar ini mengindikasikan bahwa mahasiswa meragukan fungsi perwakilan daerah oleh anggota DPR. Mereka melihat bahwa aspirasi lokal sering diabaikan begitu pemilu selesai. Hal ini diperkuat dengan ungkapan saudari AP:

“...Saya merasa mereka terlalu jauh dari rakyat. Kebijakan-kebijakannya kadang tidak menyentuh kehidupan kami sebagai mahasiswa atau masyarakat biasa. Saya melihat politisi sebagai sosok yang sering memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, bukan sebagai wakil rakyat sejati...” (Wawancara tanggal 12 Mei 2025).

Kutipan di atas mengatakan bahwa para politisi terlalu jauh dengan masyarakat, bahkan kadang keijakan tidak menyentuh kehidupan para mahasiswa dan masyarakat biasa. Para mahasiswa para politisi sebagai sosok saling memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi mereka atau kelompok, mereka bukan sebagai wakil rakyat yang sejati.

Tabel 12. Frekuensi dan Presentase Legitimasi Tradisional Jawaban X3

“Saya menilai anggota DPR berasal dari latar belakang yang baik bukan hanya mengandalkan uang dan keturunan”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	10 (16%)	15 (24%)	0
Setuju	15 (24%)	6 (10%)	0
Ragu-ragu	16 (26%)	17 (27%)	15 (25%)
Tidak Setuju	16 (26%)	17 (27%)	31 (51%)
Sangat Tidak Setuju	5 (8%)	7 (11%)	15 (24%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Pernyataan ini mengukur apakah DPR berasal dari latar belakang baik, bukan sekadar uang atau keturunan. Di Prodi IPS, sebanyak 10 mahasiswa (16%) menyatakan sangat setuju, 15 mahasiswa (24%) setuju, 16 mahasiswa (26%) ragu-ragu, 16 mahasiswa (26%) tidak setuju, dan 5 mahasiswa (8%) sangat tidak setuju bahwa anggota DPR berasal dari latar belakang yang baik. Di Geografi NK, sebanyak 15 mahasiswa (24%) sangat setuju, 6 mahasiswa (10%) setuju, 17 mahasiswa (27%) ragu-ragu, 17 mahasiswa (27%) tidak setuju, dan 7 mahasiswa (11%) sangat tidak setuju. Sedangkan di Prodi Geografi, tidak satu pun mahasiswa menyatakan setuju atau sangat setuju, 15 orang (25%) ragu-ragu, 31 orang (51%) tidak setuju, dan 15 orang (24%) sangat tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa mahasiswa dari semua prodi, terutama Geografi, menilai anggota DPR tidak memiliki latar belakang yang dapat dipercaya secara moral maupun

profesional. Ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa meragukan latar belakang anggota DPR dan tidak menganggap mereka berasal dari lingkungan yang baik.

Tabel 13. Frekuensi dan Presentase Legitimasi Kharismatik Jawaban X1

“Saya menilai anggota DPR memiliki kepribadian yang baik, (seperti tidak korupsi, religi, pintar) bukan hanya sekedar pencitraan”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	9 (14%)	13 (21%)	0
Setuju	14 (23%)	6 (10%)	0
Ragu-ragu	16(26%)	13 (21%)	12 (20%)
Tidak Setuju	13 (21%)	18 (29%)	34 (56%)
Sangat Tidak Setuju	10 (16%)	12 (19%)	15 (24%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Mahasiswa IPS menunjukkan 9 orang (15%) sangat setuju, 14 orang (23%) setuju, 16 orang (26%) ragu-ragu, 13 orang (21%) tidak setuju, dan 10 orang (16%) sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa anggota DPR memiliki kepribadian yang baik. Di Geografi NK, sebanyak 13 mahasiswa (21%) sangat setuju, 6 mahasiswa (10%) setuju, 13 mahasiswa (21%) ragu-ragu, 18 mahasiswa (29%) tidak setuju, dan 12 mahasiswa (19%) sangat tidak setuju. Di Prodi Geografi, tidak satu pun mahasiswa menyatakan setuju atau sangat setuju, 12 orang (20%) ragu-ragu, 34 orang (56%) tidak setuju, dan 15 orang (24%) sangat tidak setuju. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa citra personal para anggota DPR tidak dipercaya oleh mahasiswa. Mereka memandang kepribadian politikus cenderung dibentuk melalui pencitraan media, bukan dari ketulusan nilai dan perilaku. Artinya, mahasiswa cenderung menilai bahwa anggota DPR tidak memiliki kepribadian yang baik, dan hanya membangun citra lewat pencitraan saja. Pernyataan ini diperkuat dengan kutipan wawancara saudari APA:

“...Sulit untuk mengatakan layak jika yang kita lihat setiap hari adalah berita buruk tentang mereka. Masyarakat susah percaya tanpa bukti nyata dari kerja mereka. Sekarang lebih banyak yang saya lihat tidak sesuai antara ucapan dan tindakan...” (Wawancara tanggal 14 Mei 2025).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa sulit mengatakan seorang politisi layak di pandang dengan keadaan yang kita lihat setiap hari berita buruk tentang para politisi, masyarakat susah untuk percaya lagi tanpa bukti yang nyata dari pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan mahasiswa memandang atau melihat para politisi apa yang mereka bilang dan tindakan yang mereka ambil tidak selaras atau tidak sesuai.

Tabel 14. Frekuensi dan Presentase Legitimasi Kharismatik Jawaban X2

“Saya menilai anggota DPR dekat dan peduli dengan masyarakat, bukan sekedar untuk mencari popularitas”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	7 (11%)	14 (23%)	0
Setuju	21 (34%)	5 (8%)	0
Ragu-ragu	14 (23%)	16 (26%)	10 (16%)
Tidak Setuju	9 (14%)	19 (30%)	32 (53%)
Sangat Tidak Setuju	11 (18%)	8 (13%)	19 (31%)
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Dari tabel 14 diatas dapat kita lihat bahwa mahasiswa IPS terdiri dari 7 orang (11%) sangat setuju, 21 orang (34%) setuju, 14 orang (23%) ragu-ragu, 9 orang (15%) tidak setuju, dan 11 orang (18%) sangat tidak setuju. Mahasiswa Geografi NK terdiri dari 14 orang (23%) sangat setuju, 5 orang (8%) setuju, 16 orang (26%) ragu-ragu, 19 orang (30%) tidak setuju, dan 8 orang (13%) sangat tidak setuju. Di Prodi Geografi, tidak ada mahasiswa yang menyatakan setuju atau sangat setuju, 10 orang (16%) ragu-ragu, 32 orang (53%) tidak setuju, dan 19 orang (31%) sangat tidak setuju. Data ini memperkuat bahwa anggota DPR dianggap tidak hadir dalam keseharian masyarakat. Bagi mahasiswa, kedekatan hanya terjadi secara simbolik, bukan relasional. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa DPR tidak benar-benar dekat dan peduli dengan rakyat, hanya muncul saat dibutuhkan. Pernyataan ini diperkuat dengan kutipan wawancara dari saudari MR:

“...Banyak yang bilang politisi itu cuma peduli sama kepentingan sendiri atau kelompoknya. Pas kampanye semangat janji ini-itu datang ke rumah-rumah warga dan merasa paling dekat dengan rakyat, tapi pas udah kepilih malah sibuk cari keuntungan pribadi. Tapi, nggak semuanya gitu sih, ada juga yang beneran niat bantu rakyat...” (Wawancara tanggal 11 Mei 2025).

Kutipan di atas tersebut menyatakan bahwa banyak yang bilang politisi itu cuma peduli sama kepentingan sendiri atau kelompok mereka. Ketika kampanye semangat janji mereka dirumah-rumah masyarakat dan mereka merasa sudah paling dekat dengan masyarakat, ketiak sudah duduk dijabatannya mereka malah sibuk untuk mencari keuntungan pribadi mereka, tetapi tidak semua para poltisi seperti itu ada beberapa politisi yang benar niat untuk membantu masyarakat.

Tabel 15. Frekuensi dan Presentase Stigma Sosial Cap Keanggota DPR Jawaban X1
“Anggota DPR yang terpilih karena politik uang”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	23 (37%)	14 (23%)	14 (23%)
Setuju	14 (23%)	18 (29%)	31 (51%)
Ragu-ragu	18 (29%)	15 (24%)	16 (26%)
Tidak Setuju	7 (11%)	10 (16%)	0
Sangat Tidak Setuju	0	5 (8%)	0
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Tabel 14 merincikan bahwa di IPS, 23 mahasiswa (37%) sangat setuju, 14 mahasiswa (23%) setuju, 18 mahasiswa (29%) ragu-ragu, dan 7 mahasiswa (11%) tidak setuju bahwa anggota DPR terpilih karena politik uang. Geografi NK terdiri dari 14 mahasiswa (23%) sangat setuju, 18 mahasiswa (29%) setuju, 15 mahasiswa (24%) ragu-ragu, 10 mahasiswa (16%) tidak setuju, dan 5 mahasiswa (8%) sangat tidak setuju. Di Geografi, 14 mahasiswa (23%) sangat setuju, 31 mahasiswa (51%) setuju, dan 16 mahasiswa (26%) ragu-ragu, tanpa ada yang menyatakan tidak setuju. Mayoritas mahasiswa dari semua prodi setuju bahwa praktik politik uang masih sangat dominan dalam proses elektoral. Tidak ada yang tidak setuju. Ini memperlihatkan bahwa mayoritas mahasiswa yakin bahwa politik uang masih menjadi cara utama dalam pemilihan anggota DPR.

Tabel 16. Frekuensi dan Presentase Stigma Sosial Cap Keanggota DPR Jawaban X2
“Anggota DPR belum menjalankan fungsinya secara optimal”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	23 (37%)	22 (36%)	24 (39%)
Setuju	22 (36%)	13 (21%)	31 (51%)
Ragu-ragu	12 (19%)	20 (32%)	6 (10%)
Tidak Setuju	5 (9%)	2 (3%)	0
Sangat Tidak Setuju	0	5 (8%)	0
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Tabel 16 memaparkan dari Prodi IPS, 23 mahasiswa (37%) sangat setuju, 22 mahasiswa (35%) setuju, 12 mahasiswa (19%) ragu-ragu, dan 5 mahasiswa (9%) tidak setuju. Mahasiswa Geografi NK terdiri dari 22 mahasiswa (36%) sangat setuju, 13 mahasiswa (21%) setuju, 20 mahasiswa (32%) ragu-ragu, 2 mahasiswa (3%) tidak setuju, dan 5 mahasiswa (8%) sangat tidak setuju. Di Prodi Geografi, 24 mahasiswa (39%) sangat setuju, 31 mahasiswa (51%) setuju, dan 6 mahasiswa (10%) ragu-ragu. Tidak ada yang tidak setuju. Mayoritas mahasiswa menilai bahwa DPR belum menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal, baik dari sisi substansi maupun akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa menilai DPR belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Namun, ada juga beberapa mahasiswa yang masih berpandangan netral terhadap penjalanan fungsi DPR itu sendiri. Saudari SN misalnya, yang tidak memukul rata semua politisi sama.

“...Saya punya pandangan netral. Ada yang memang kerja untuk rakyat, ada juga yang tidak. Jadi tidak bisa disamaratakan. Saya tidak bisa memukul rata semua politisi. Ada

yang buruk, tapi ada juga yang masih idealis dan berjuang untuk rakyat, walau jumlahnya sedikit...” (Wawancara tanggal 12 Mei 2025).

Dari kutipan tersebut ada mahasiswa yang memandang para politisi ini netral, mereka memandang bahwa ada anggota politisi ini bekerja untuk rakyat ada juga yang tidak bekerja sebagai aspirasi rakyat, jadi tidak bisa semua para politisi disamaratakan, adapun anggota politisi yang buruk tapi masih ada anggota politisi ini yang idealis dan berjuang untuk rakyat walaupun jumlah anggota politisi seperti ini hanya sedikit.

Tabel 17. Frekuensi dan Presentase Stigma Sosial Cap Keanggota DPR Jawaban X3
“Anggota DPR dekat dengan masyarakat hanya semasa kampanye saja”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	28 (45%)	31 (50%)	24 (39%)
Setuju	21 (34%)	16 (26%)	32 (53%)
Ragu-ragu	6 (10%)	7 (11%)	5 (8%)
Tidak Setuju	7 (11%)	3 (5%)	0
Sangat Tidak Setuju	0	5 (8%)	0
Total	62 (100%)	62 (100%)	61(100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Pada tabel 17 kita dapat melihat bahwa, mahasiswa IPS terdiri dari 28 orang (45%) sangat setuju, 21 orang (34%) setuju, 6 orang (10%) ragu-ragu, dan 7 orang (11%) tidak setuju. Di Geografi NK, 31 mahasiswa (50%) sangat setuju, 16 mahasiswa (26%) setuju, 7 mahasiswa (11%) ragu-ragu, 3 mahasiswa (5%) tidak setuju, dan 5 mahasiswa (8%) sangat tidak setuju. Mahasiswa Geografi terdiri dari 24 orang (39%) sangat setuju, 32 orang (53%) setuju, dan 5 orang (8%) ragu-ragu. Tidak ada yang tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa relasi DPR dan rakyat hanya dirasakan saat kampanye, mencerminkan kedangkalan hubungan politik. Ini menguatkan bahwa mahasiswa merasa DPR hanya hadir saat kampanye dan jarang terlihat setelahnya. Ada banyak kutipan wawancara yang menguatkan interpretasi diatas, misalnya dari saudara MP yang menyebutkan bahwa para politisi dekat dengan rakyat hanya semasa kampanye saja, setelah itu mereka menghilang. Sehingga membuat rakyat merasa dibohongi.

“...Saya pernah mendengar cerita dari lingkungan saya tentang seorang anggota DPRD di daerah yang awalnya sangat aktif saat kampanye, rajin turun ke masyarakat, dan menjanjikan banyak hal. Tapi setelah terpilih, orang tersebut jarang terlihat dan banyak janji yang tidak ditepati. Hal seperti ini membuat masyarakat kecewa dan merasa tertipu...” (Wawancara tanggal 10 Mei 2025).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa seorang anggota DPRD awalnya sangat aktif didaerahnya, aktif ketika kampanye, rajin turun kemasyarakat dan menjanjikan banyak hal kepada masyarakat, tetapi setelah terpilih menjadi seorang politisi anggota DPRD ini jarang kelihatan dimasyarakat bahkan janjinya tidak ditepati ketika malkukan kampanye dimasyarakat, hal ini membuat masyarakat kecewa yang merasa tertipu oleh anggota politisi ini.

Tabel 18. Frekuensi dan Presentase Stigma Sosial Cap Keanggota DPR Jawaban X4
“Anggota DPR cenderung mudah membuat janji tapi jarang untuk menepati”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	28 (45%)	23 (37%)	16 (26%)
Setuju	21 (34%)	21 (34%)	34 (56%)
Ragu-ragu	7 (11%)	12 (19%)	11 (18%)
Tidak Setuju	6 (10%)	1 (2%)	0
Sangat Tidak Setuju	0	5 (8%)	0
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Mahasiswa IPS menunjukkan 28 orang (45%) sangat setuju, 21 orang (34%) setuju, 7 orang (11%) ragu-ragu, dan 6 orang (10%) tidak setuju. Mahasiswa Geografi NK terdiri dari 23 orang (37%) sangat setuju, 21 orang (34%) setuju, 12 orang (19%) ragu-ragu, 1 orang (2%) tidak setuju, dan 5 orang (8%) sangat tidak setuju. Di Prodi Geografi, 16 orang (26%) sangat setuju, 34 orang (56%) setuju, dan 11 orang (18%) ragu-ragu. Tidak ada yang tidak setuju. Mayoritas mahasiswa menyatakan bahwa janji DPR bersifat manipulatif

dan tidak konsisten dengan realisasi. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai janji politik sering kali tidak ditepati.

Tabel 19. Frekuensi dan Presentase Stigma Sosial Cap Keanggota DPR Jawaban X5
“Anggota DPR hanya memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri”

Skor	IPS	Geografi NK	Geografi
Sangat Setuju	26 (42%)	26 (42%)	18 (30%)
Setuju	12 (19%)	19 (31%)	33 (54%)
Ragu-ragu	15 (24%)	10 (16%)	10 (16%)
Tidak Setuju	9 (15%)	2 (3%)	0
Sangat Tidak Setuju	0	5 (8%)	0
Total	62 (100%)	62 (100%)	61 (100%)

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Di IPS, 26 mahasiswa (42%) sangat setuju, 12 mahasiswa (19%) setuju, 15 mahasiswa (24%) ragu-ragu, dan 9 mahasiswa (15%) tidak setuju. Mahasiswa Geografi NK terdiri dari 26 orang (42%) sangat setuju, 19 orang (31%) setuju, 10 orang (16%) ragu-ragu, 2 orang (3%) tidak setuju, dan 5 orang (8%) sangat tidak setuju. Di Geografi, 18 orang (30%) sangat setuju, 33 orang (54%) setuju, dan 10 orang (16%) ragu-ragu. Tidak ada yang menyatakan tidak setuju. Artinya, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai perilaku umum anggota DPR oleh mahasiswa, memperlihatkan tingkat sinisme politik yang sangat tinggi. Ini memperlihatkan bahwa mahasiswa meyakini DPR sering menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Tabel 20. Stastistik Deskriptif IPS

		Legitimasi Rasional	Legitimasi Tradisional	Legitimasi Kharismatik	Stigma Sosial
N	Valid	62	62	62	62
	Missing	0	0	0	0
Mean		8.52	8.76	5.95	9.97
Std. Deviation		3.082	3.207	2.479	4.446

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 23

Rata-rata skor legitimasi rasional mahasiswa prodi IPS sebesar 8.52, adapun legitimasi tradisional sebesar 8.76, dan legitimasi kharismatik sebesar 5.95, serta stigma sosial 9.97. Skor legitimasi cenderung rendah, terutama pada aspek kharismatik, sedangkan skor stigma cukup tinggi, menunjukkan persepsi negatif yang merata.

Tabel 21. Stastistik Deskriptif Geografi NK

		Legitimasi Rasional	Legitimasi Tradisional	Legitimasi Kharismatik	Stigma Sosial
N	Valid	62	62	62	62
	Missing	0	0	0	0
Mean		8.19	8.98	6.19	10.95
Std. Deviation		3.228	3.160	2.703	5.505

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 23

Rata-rata skor pada prodi Geografi NK di legitimasi rasional sebesar 8.19, tradisional 8.98, kharismatik 6.19, dan stigma sosial 10.95. Mahasiswa Geografi NK menjadi kelompok paling tinggi dalam hal stigma sosial, menunjukkan tingkat distrust yang sangat kuat.

Tabel 22. Stastistik Deskriptif Geografi

		Legitimasi Rasional	Legitimasi Tradisional	Legitimasi Kharismatik	Stigma Sosial
N	Valid	61	61	61	61
	Missing	0	0	0	0
Mean		12.13	12.16	8.20	9.21
Std. Deviation		1.297	1.083	.853	1.540

Mahasiswa prodi Geografi memiliki rata-rata legitimasi rasional sebesar 12.13, tradisional 12.16, kharismatik 8.20, dan stigma sosial 9.21. Meskipun skor legitimasi tampak tinggi, kemungkinan hal ini disebabkan oleh pembalikan skoring item. Skor tinggi justru mencerminkan penolakan yang lebih ekstrem terhadap elite politik.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi dan stigma mahasiswa terhadap elit politik pasca Pemilu 2024. Data dikumpulkan dari 185 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dari tiga program studi: Pendidikan IPS, Geografi NK, dan Pendidikan Geografi. Mayoritas responden berusia di bawah 20 tahun, mengindikasikan dominasi Gen-Z dalam sampel penelitian ini. Sebagian besar mahasiswa juga diketahui tinggal di kos-kosan, kemungkinan besar karena jarak tempat tinggal asal yang jauh dari kampus atau kurangnya akses transportasi yang memadai. Alat transportasi yang digunakan untuk ke kampus bervariasi antar program studi, dengan dominasi kendaraan roda dua di IPS dan berjalan kaki di Geografi NK dan Pendidikan Geografi. Partisipasi mahasiswa dalam Pemilu 2024 tergolong tinggi, dengan mayoritas responden menyatakan pernah menggunakan hak pilihnya. Namun, ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa dari ketiga program studi menunjukkan sikap apatis terhadap karier politik, dengan sebagian besar tidak berminat menjadi politisi. Rendahnya minat ini juga dapat dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar mahasiswa tidak tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, yang menunjukkan lemahnya kesadaran kolektif dan pengalaman sosial-politik. Secara spesifik, hasil analisis menunjukkan bahwa legitimasi tradisional memiliki rata-rata tertinggi (mean = 9.94), diikuti oleh legitimasi rasional (mean = 9.6), sementara legitimasi karismatik memperoleh skor terendah (mean = 6.77). Ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda terhadap jenis legitimasi elit politik.

Dalam Raisa et al. (2024) disebutkan bahwa Legitimasi kekuasaan tidak hanya berasal dari struktur formal, tetapi juga dari kualitas argumentasi dan kesepakatan yang dicapai dalam diskursus publik. Dalam aspek legitimasi rasional, persepsi mahasiswa cenderung beragam, namun menunjukkan kecenderungan negatif, khususnya di Prodi Geografi. Mahasiswa Prodi Geografi menjadi yang paling skeptis terhadap proses legislasi yang dijalankan DPR, dengan sebagian besar menyatakan tidak setuju bahwa DPR menyusun undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Demikian pula, kepercayaan terhadap fungsi DPR dalam hal penganggaran sangat rendah, terutama di Prodi Geografi, di mana tidak ada satu pun mahasiswa yang menyatakan sangat setuju maupun setuju bahwa DPR mempertimbangkan kebutuhan rakyat dalam penyusunan anggaran. Hal ini diperkuat oleh pandangan mahasiswa bahwa citra politisi buruk karena berita korupsi dan persaingan kotor, sehingga sulit untuk tidak bersikap sinis terhadap mereka. Mayoritas mahasiswa juga merasa program kerja DPR tidak dibuat untuk rakyat, dengan Prodi Geografi menunjukkan ketidakpercayaan paling tegas terhadap komitmen program DPR terhadap rakyat. Hal ini menguatkan kekhawatiran bahwa perilaku elit politik seringkali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas masyarakat, melainkan lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Legitimasi tradisional adalah bentuk legitimasi yang berasal dari otoritas tradisional. Otoritas tradisional ini didasarkan pada kepercayaan bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi tersebut adalah wajar dan patut dihormati (Mansur et al., 2013). Terkait legitimasi tradisional, data menunjukkan bahwa mahasiswa meragukan legitimasi para anggota DPR, tidak melihat kekuasaan diperoleh melalui kemampuan atau prestasi, melainkan melalui kekayaan, dinasti politik, atau akses terhadap kekuasaan. Contohnya, mahasiswa Geografi secara signifikan tidak setuju bahwa anggota DPR mendapatkan kekuasaan karena kemampuan, bukan karena uang atau warisan status sosial keluarga. Selain itu, mahasiswa merasa bahwa anggota DPR tidak benar-benar memperjuangkan aspirasi dari daerah asal mereka, dan aspirasi lokal sering diabaikan setelah pemilu selesai. Ada pandangan bahwa pekerjaan anggota DPR seringkali hanya sebatas formalitas, tanpa semangat untuk membuat perubahan yang berarti. Sikap skeptis juga terlihat pada penilaian terhadap latar belakang anggota DPR, di mana banyak mahasiswa meragukan latar belakang mereka dan tidak menganggap mereka berasal dari lingkungan yang baik.

Aspek legitimasi karismatik menunjukkan bahwa citra personal para anggota DPR tidak dipercaya oleh mahasiswa. Mahasiswa cenderung menilai bahwa anggota DPR tidak memiliki kepribadian yang baik dan hanya membangun citra melalui pencitraan. Kesulitan untuk mempercayai anggota DPR diperkuat dengan kurangnya bukti nyata dari pekerjaan mereka dan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Selain itu, data memperkuat pandangan bahwa anggota DPR dianggap tidak hadir dalam keseharian masyarakat, dan kedekatan hanya terjadi secara simbolik, bukan relasional. Banyak mahasiswa merasa DPR hanya dekat dengan rakyat saat kampanye dan sibuk mencari keuntungan pribadi setelah terpilih. Dalam Fitria & Priyatama (2025) legitimasi karismatik didefinisikan sebagai legitimasi yang didasarkan pada karisma individu atau suatu hal yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa.

Dayanti & Legowo (2021) menyebutkan bahwa Goffman mendefinisikan stigma sebagai atribut yang merusak citra diri seseorang, membawa pengaruh besar pada kepribadian seseorang, dan akhirnya

membuatnya tidak bisa berperilaku seperti biasanya. Stigma ini diberikan berupa tanda yang dibuat dengan tujuan untuk memperlihatkan atau menginformasikan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang memiliki tanda tersebut merupakan seseorang yang memiliki perbedaan atau berperilaku menyimpang, seperti penjahat, pelaku kriminal, budak, pengkhianat, dan semacamnya. Kemudian elite politik merujuk pada para pejabat di tingkat eksekutif dan legislatif Kabupaten Pamekasan. Mereka adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam perumusan dan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) syariat (Purnomo, 2014). Pada hasil yang sudah dimuat sebelumnya daoat diperoleh skor stigma sosial terhadap elit politik juga cukup tinggi (mean = 10.05). Mayoritas mahasiswa dari semua program studi meyakini bahwa praktik politik uang masih sangat dominan dalam proses elektoral untuk pemilihan anggota DPR. Selain itu, mahasiswa menilai bahwa DPR belum menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal, baik dari sisi substansi maupun akuntabilitas. Ada pandangan bahwa anggota DPR hanya dekat dengan masyarakat semasa kampanye saja, yang mencerminkan kedangkalan hubungan politik dan membuat rakyat merasa dibohongi. Mayoritas mahasiswa juga menilai bahwa janji politik sering kali tidak ditepati dan bersifat manipulatif. Terakhir, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai perilaku umum anggota DPR oleh mahasiswa, yang memperlihatkan tingkat sinisme politik yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan yang signifikan dari kalangan mahasiswa terhadap elit politik, mencerminkan krisis representasi dan kepercayaan dalam sistem politik pasca pemilu. Meskipun demikian, beberapa mahasiswa memiliki pandangan netral, tidak memukul rata semua politisi sama, mengakui adanya politisi yang masih idealis dan berjuang untuk rakyat.

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Padang, terutama generasi Z, memiliki partisipasi tinggi dalam Pemilu 2024 namun menunjukkan apatisme terhadap keterlibatan politik. Mereka memiliki ketidakpercayaan (*distrust*) yang signifikan terhadap elit politik, yang tercermin dalam berbagai stigma sosial. Mahasiswa skeptis bahwa DPR menyusun undang-undang dan anggaran untuk rakyat, merasa bahwa kekuasaan elit lebih banyak diperoleh melalui uang atau keturunan daripada kemampuan, dan memandang citra personal politisi sebagai pencitraan belaka. Mereka juga percaya bahwa anggota DPR terpilih karena politik uang, belum menjalankan fungsi secara optimal, hanya dekat saat kampanye, mudah berjanji tetapi jarang menepati, dan memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri. Stigma-stigma ini secara kolektif menunjukkan krisis kepercayaan dan representasi antara mahasiswa dan elit politik, meskipun ada beberapa mahasiswa yang masih memiliki pandangan netral.

Rujukan

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Wahid, B., Refra, M. S., & Basri, L. (2021). Kapitalisasi Modal dan Kepentingan Elit Politik (Studi Arena Perebutan Pemimpin Lokal Antara Anak Adat Moi di Kabupaten Sorong 2017). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 104–116. <https://doi.org/10.33506/jn.v6i2.1247>
- Dayanti, F., & Legowo, M. (2021). Stigma Dan Kriminalitas : Studi Kasus Stigma Dusun Begal di Bangkalan Madura. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 96–110. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3202>
- Fitria, A. A., & Priyatama, A. N. (2025). Keris Taming Sari dan Legitimasi Kesaktian Hang Tuah. *Mimesis*, 6(1), 16-27.
- Harjudin, L. O. (2020). Dilema Penanganan Covid-19: Antara Legitimasi Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 1(1), 90. <https://doi.org/10.52423/jkps.v1i1.13249>
- Haryanto, H. C., & Rahmania, T. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? *Jurnal Psikologi*, 42(3), 243. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9913>
- Hasibuan, P. A. S., Indrawati, M., & Hartati, C. S. (2021). Punahnya Etika Moral Elit Politik Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 1(4).
- Khakim, M. S. (2023). Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 98–116. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.47>
- Kori, G. A. S. A., & Sariani, N. L. P. (2024). Pemanfaatan Media Sosial dan Media Cetak untuk Menyardarkan Masyarakat Khususnya di Desa Pemogan Tentang Pentingnya Pemilu. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 131. <https://doi.org/10.35906/resona.v8i1.1951>

-
- Lestari, A. D. (2022). Implikasi Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Amanda. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 412–427.
- Mansur, M., Sofianto, K., & Mahzuni, D. (2013). Otoritas dan Legitimasi Studi Tentang Kedudukan Pemimpin Tradisional di Loloda Maluku-Utara (1808-1958). *Sosiohumaniora*, 15(1), 64. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5240>
- Pradana, M. Y. A. (2019). Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepeuh Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 181. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-07>
- Purnamawati, E. (2017). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Purnomo, A. (2014). Politik Hukum Elite Politik. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 1–19.
- Putra, A. (2024). Sejumlah Skandal Pemimpin Politik di Indonesia: Signifikansi Terhadap Keluaran 18: 21. *Teologis, Relevan, Aplikatif, Cendikia, Kontekstual*, 3(2), 3-30.
- Tilome, A. A., Agustang, A. D. M. P., & Agustang, A. (2021). Pertukaran Sosial Elit Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo.
- Sembiring, R. A., & Khoiri, M. (2021). The Relation of Elite, Sub-Elite, and Village Community in Maintaining the Masra Family Dynasty in Gapurana Village, Sumenep Regency: Study on the H. Andiwarto Regime in 2013-2019. *Society*, 9(2), 420–428. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.271>
- Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>
- Zakiah, Z., Agnia, R., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. S. M. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2).
-